



BerAKHLAK
BerAKHLAK melayani dan memberi layanan
kepada masyarakat yang dapat berkolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2025

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2025 dapat berjalan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 ini disusun dengan menyajikan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 – 2029 serta menggambarkan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan mengacu pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, anggaran dan koordinir pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan pada penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan Laporan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta aktif dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporan ini.

Bekasi, 13 Maret 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota
Bekasi



KARTO, S.IP.,M.Si

NIP. 196704151986031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2025 – 2029. Laporan ini berisi perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Dalam penyusunan LKIP tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disajikan Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola perencanaan kinerja mulai Rencana Strategis dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN). Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029.

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis serta 9 (sembilan) program. Secara kumulatif capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berdasarkan Sasaran Strategis Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2025 mencapai tingkat persentase **(101.79%)**, Persentase Peningkatan Produksi Perikanan pada tahun 2025 mencapai tingkat persentase **(100%)**, serta Persentase Peningkatan Produksi Pertanian pada tahun 2025 mencapai tingkat persentase sebesar **(75%)**. Sementara itu, secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berdasarkan persentase capaian kinerja baik yang berbasis sasaran maupun tujuan strategis adalah sebesar **(100%)**. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dapat dinyatakan berhasil.

Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, maka dilaksanakan evaluasi terhadap program-program dalam suatu koridor atas serangkaian perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komprehensif. Masih dalam konteks ini, hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi.....	9
1.3 Isu Strategis.....	10
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	12
1.5 Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.3 Realisasi Anggaran.....	62
3.4 Prestasi Organisasi.....	63
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Rencana Tindak.....	68

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja (PERKIN) Murni dan Perubahan Tahun 2025;
2. Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman pangan atas kontribusi terhadap peningkatan produksi padi Provinsi Jawa barat sebesar 10,2 juta Ton GKG dan Nasional 60,37 juta Ton GKG (15 Desember 2025);
3. Sertifikat Peringkat Lima Belas Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2025.....	10
Tabel 2.1	Tujuan/Sasaran Renstra DKPPP Tahun 2024-2026 dengan Renstra DKPPP Tahun 2025-2029.....	11
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2030.....	16
Tabel 2.3	PERKIN Murni DKPPP Tahun 2025 dan PERKIN Perubahan DKPPP Kota Bekasi Tahun	18
Tabel 2.4	Program dan Pendanaan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 sesuai PERKIN murni dan PERKIN Perubahan DKPPP tahun 2025.....	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025.....	21
Tabel 3.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025.....	24
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	24
Tabel 3.4	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	25
Tabel 3.5	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Skor Pola Pangan Harapan Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029).....	26
Tabel 3.6	Skor PPH menurut Provinsi Tahun 2025.....	27
Tabel 3.7	Skor PPH, konsumsi kalori dan protein, menurut Kabupaten/Kota, 2025.....	28
Tabel 3.8	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan.....	29
Tabel 3.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Skor Pola Pangan harapan.....	30
Tabel 3.10	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan.....	33
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2025.....	34

Tabel 3.12	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	34
Tabel 3.13	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029).....	35
Tabel 3.14	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan.....	37
Tabel 3.15	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan.....	37
Tabel 3.16	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian.....	40
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025.....	41
Tabel 3.18	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	41
Tabel 3.19	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029).....	42
Tabel 3.20	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian.....	43
Tabel 3.21	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian.....	44
Tabel 3.22	Realisasi Belanja Langsung Urusan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.....	7
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025.....	11
Gambar 1.2	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya.....	25
Gambar 3.2	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya.....	34
Gambar 3.3	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Pembangunan Daerah merupakan salah satu Sub Sistem dari Pembangunan Nasional yang meliputi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang ditujukan untuk Meningkatkan Harkat, Martabat dan Memperkuat Jati Diri serta Kepribadian Masyarakat dalam Pendekatan Lokal, Nasional dan *Global*. Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan Keseimbangan berbagai Aspek dalam Satu Kesatuan Wilayah Pembangunan Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya, Politik, Pemerintahan dan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel (*Good Governance*). Pemerintahan yang Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam Usaha mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan Aspirasi serta Cita-cita Masyarakat dalam mencapai Masa Depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pertanggungjawaban yang Tepat, Jelas dan Terukur, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara Berdaya Guna, Berhasil Guna serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan hal tersebut bahwa setiap Kegiatan dan Hasil Akhir dari Kegiatan Penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat dan Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara, setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara mulai dari Pejabatnya untuk Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan kepada Atasan masing-masing, kepada Lembaga-lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas yang Berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas dan Media Pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara Periodik dan Melembaga.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diuraikan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada Pemberi Mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk Meningkatkan Kinerjanya.

Penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan Proses Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan yang merujuk pada dokumen perencanaan yang relevan, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025. Tujuan Penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi adalah sebagai Sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam menyampaikan Pertanggungjawaban Kinerja kepada Seluruh Pemangku Kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi) atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Selain sebagai Bahan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dan Pembangunan secara Baik dan Benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kebijakan yang Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjadikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi yang Akuntabel, sehingga dapat berperan secara Efisien, Efektif dan Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat dan Lingkungan yang Tentram, Tertib serta Kondusif;
- c. Menjadikan Masukan dan Umpan Balik dari Pihak-pihak yang Berkepentingan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

Dalam penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 yang terdapat dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Tujuan dan Sasaran yang ada dalam RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 maupun Sasaran yang ada pada RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. IKU DKPPP Kota Bekasi yang pertama adalah **“Skor Pola Pangan Harapan”**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra DKPPP Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. IKU DKPPP Kota Bekasi yang kedua adalah **Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra DKPPP Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Produktivitas Perikanan;

3. IKU DKPPP Kota Bekasi yang ketiga adalah **Persentase Peningkatan Produksi Pertanian**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra DKPPP Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Produktivitas Pertanian.

Penetapan Sasaran Strategis dan IKU DKPPP Kota Bekasi tersebut untuk Menunjang Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Struktur Ekonomi Kota Bekasi Yang Tangguh Dan Inklusif”**.

Berdasarkan Latar Belakang ini, untuk melakukan Pembahasan lebih lanjut secara Komprehensif mengenai Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami uraikan lebih lanjut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, yaitu membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pangan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pertanian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Pertanian, bidang perikanan, bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan.

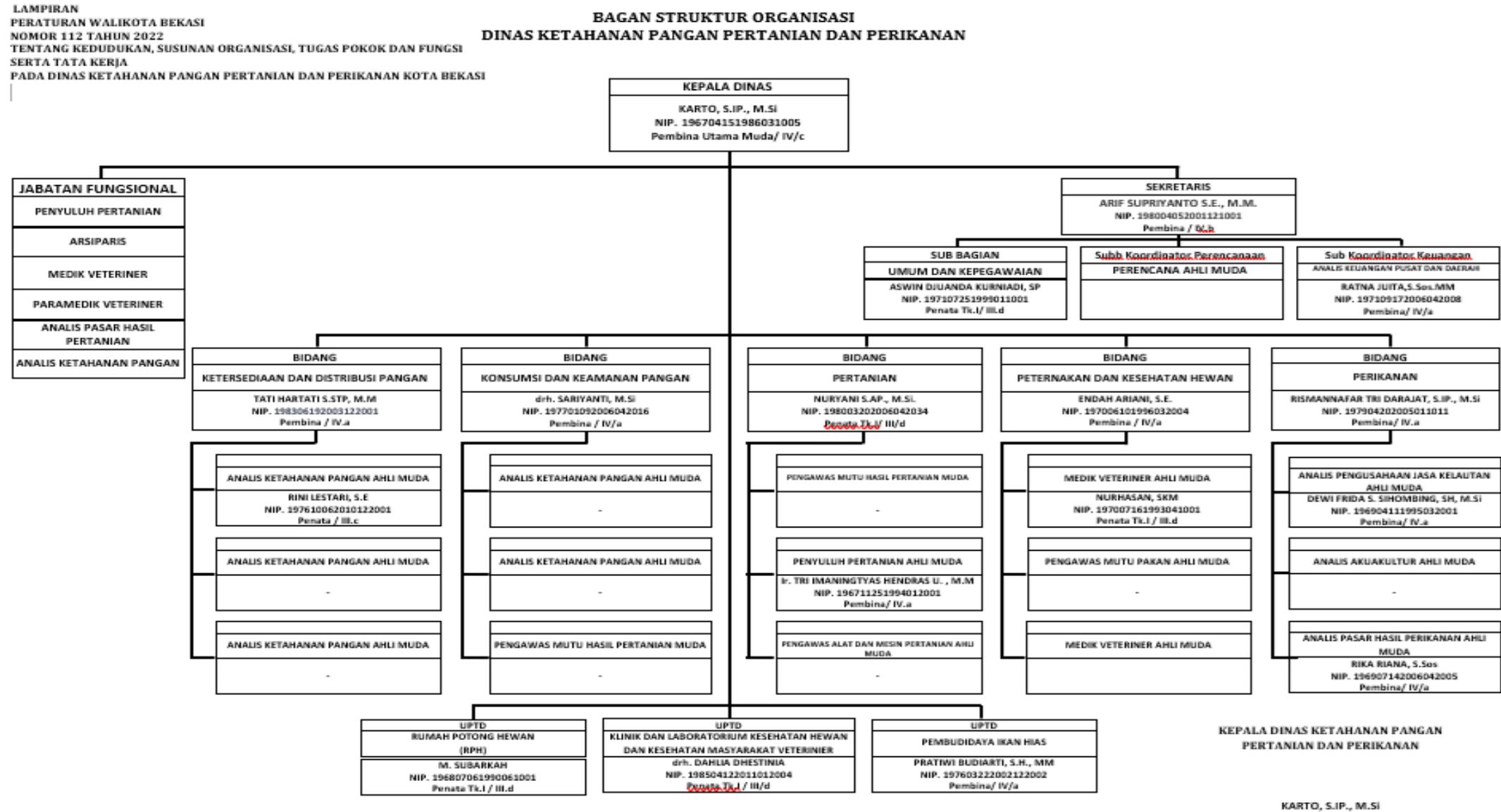
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris DKPPP

yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 5 (lima) bidang yaitu: (1) bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; (2) bidang Konsumsi dan Keamanan pangan; (3) bidang Perikanan; (4) bidang Pertanian; serta (5) bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. Bidang Perikanan;
6. Bidang Pertanian;
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. UPTD;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber : Sub bagian Umum Kepegawaian DKPPP 2025

1.3 ISU STRATEGIS

Dalam merumuskan isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, dilakukan proses identifikasi terhadap berbagai dinamika lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal organisasi. Proses ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perangkat daerah. Selanjutnya isu-isu tersebut dirumuskan menggunakan teknik yang sistematis guna memastikan bahwa isu yang ditetapkan benar-benar bersifat strategis, berdampak luas, dan membutuhkan respon kebijakan jangka menengah.

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi disimpulkan isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Isu strategis tersebut antara lain:

1. Kerawanan Pangan;
2. Diversifikasi pangan;
3. Produksi ikan konsumsi kurang optimal;
4. Produksi pertanian kurang optimal.

1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja DKPPP pada tahun 2025 adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan dari 9 (sembilan) program, yang terdiri dari:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan terdiri dari 2 kegiatan :
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan terdiri dari 2 kegiatan :
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari 1 kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri 2 kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 2 kegiatan :
 - a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
 - b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 5 kegiatan :
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer;
 - e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 3 kegiatan :
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, DKPPP Kota Bekasi memberikan Pelayanan dan Pembinaan kepada Unsur terkait dibidang Pangan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait, Adapun Produk Layanan DKPPP Kota Bekasi diantaranya, yaitu :

1. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan;
2. Rekomendasi Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
3. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
4. Rekomendasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Sementara;
5. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ternak;
6. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;
7. Rekomendasi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
8. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
9. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/ Produk Hewan;
10. Penerbitan Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (PAH);
11. Pemotongan Hewan Sapi di RPH (Rumah Potong Hewan);
12. Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
13. Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Kios Pembudidayaan Ikan Hias.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 97 orang pegawai yang terdiri dari 56 orang laki-laki dan 41 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 44 orang PNSD, 30 orang PPPK, 2 orang TKK dan 21 orang Tenaga Harian Lepas (THL), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dan gambar grafik berikut:

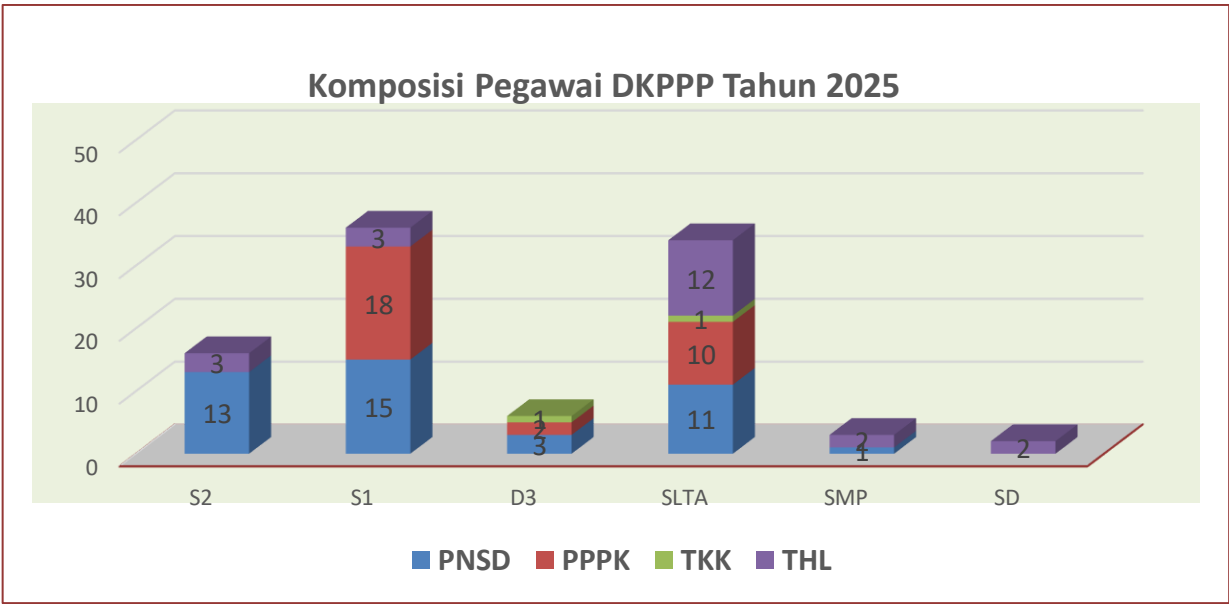
Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

URAIAN	JUMLAH	PEGAWAI	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Jumlah PNSD	44	22	22
Jumlah PPPK	30	13	17
Jumlah TKK	2	1	1
Jumlah THL	21	20	1
Jumlah	97	56	41

Sumber: siap.bekasikota.go.id, 2025

Apabila dilihat berdasarkan Gender/Jenis Kelamin, paling banyak aparatur DKPPP berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 56 orang atau 57.73%, dan Perempuan sebanyak 41 orang atau 42.27%. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur DKPPP tingkat pendidikan terakhirnya adalah S1 sekitar 36 orang atau 37.11%, sisanya untuk S2 sekitar 16 orang atau 16.49%, D3 sebanyak 6 orang atau 6.18%, SLTA sebanyak 33 orang atau 34.02%, SMP sebanyak 3 orang atau 3.09%, SD sebanyak 2 orang atau 2.06%, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, 2025

Secara kuantitas aparatur DKPPP sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DKPPP, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana Pertanian, sarjana Peternakan, serta Dokter Hewan.

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi memiliki 17 Unit Mobil, yaitu 1 unit mobil dinas jabatan Kepala Dinas, 1 unit mobil dinas jabatan sekretaris, 5 unit mobil dinas jabatan Kepala Bidang, 10 unit mobil operasional lapangan, 1 unit mobil laboratorium Sedangkan Kendaraan Dinas Roda Dua terdapat 23 unit motor. Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi karena dituntut setiap saat ke lapangan, baik untuk berkoordinasi maupun untuk mengadakan penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan serta monitoring dan pelaksanaan kegiatan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi tahun 2025 terbagi ke dalam 4 (empat) bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan tentang latar belakang penyusunan dokumen, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, SDM lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, isu strategis yang dihadapi dan sistematika penulisan dokumen LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Menjabarkan terkait perencanaan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2025 yang mencakup dasar perencanaan kinerja, Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi di Tahun 2025 dan program dan anggaran yang dibutuhkan guna menunjang tercapainya sasaran kinerja di tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Analisis capaian kinerja tahun 2025 antara lain dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target 2025, target perencanaan jangka menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Standar Nasional/Provinsi/Daerah; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi di tahun 2025 dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Program dan 15 (lima belas) indikator kinerja/program. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2025, dengan target satuan berupa % (persen) dan ton sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Pada tahun 2025 adalah masa transisi/ peralihan kepemimpinan Kota Bekasi. Dalam penyusunan perencanaan kinerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi masih berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang menjadi dasar penyusunan Renstra DKPPP Tahun 2024-2026, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan pada bulan September 2025. Dengan perubahan Renstra DKPPP Tahun 2024-2026 menjadi Renstra DKPPP Tahun 2025-2029 terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis sehingga realisasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun perbedaan tujuan dan sasaran strategis Renstra DKPPP Tahun 2024-2026 dengan Renstra DKPPP Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan/Sasaran Renstra DKPPP Tahun 2024-2026 dengan Renstra DKPPP Tahun 2025-2029

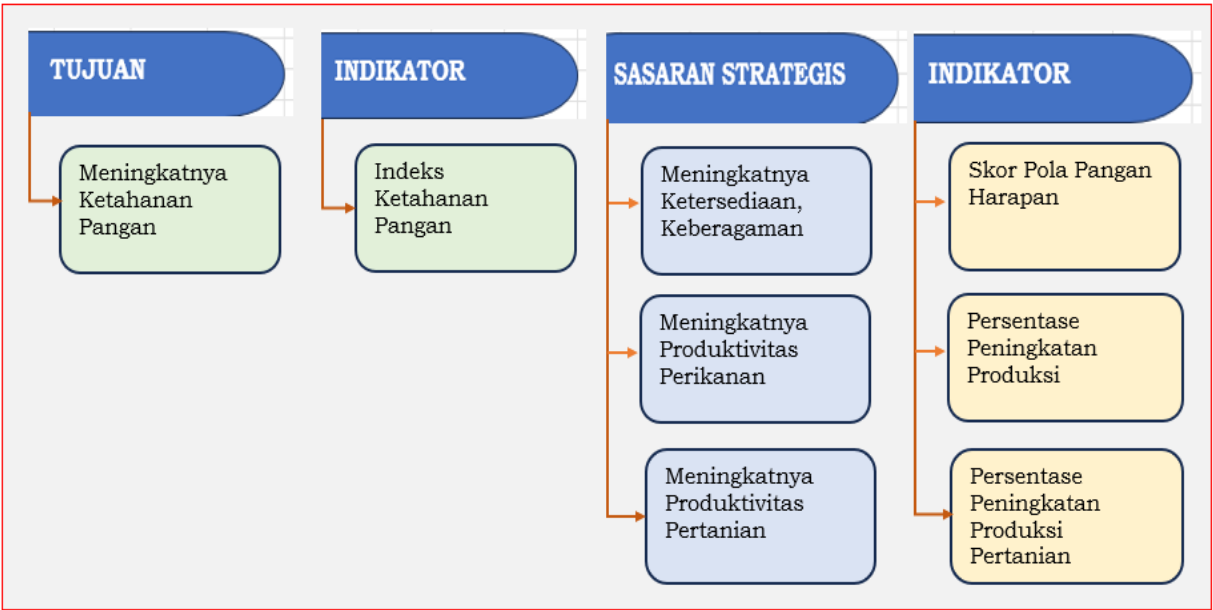
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2024-2026						TUJUAN/SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2025-2029					
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PENANG GUNG JAWAB	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PENANG GUNG JAWAB
Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP	Nilai (LHE) AKIP DKPPP	Nilai	85	Sekretaris	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota	Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92	Kepala Bidang KDP, Kepala Bidang KKP
Mengendalikan Laju Inflasi	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	%	0.45%	Kepala Bidang KDP, Kepala Bidang KKP		Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,03%	Kepala Bidang Perikanan
Meningkatkan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota	Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	%	1.15%	Kepala Bidang Perikanan , Kepala Bidang Pertanian, Kepala Bidang PKH		Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,04%	Kepala Bidang Pertanian, Kepala Bidang PKH

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini didasarkan kepada Rencana Strategis DKPPP Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis yang telah memuat tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopotensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Selanjutnya, Cascading kinerja merupakan arsitektur kinerja yang akan memperlihatkan adanya keterkaitan kinerja DKPPP dengan kondisi yang ingin diwujudkan, lebih jauh yaitu adanya keterkaitan antara unit kerja terhadap kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sehingga kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja dapat terlihat dengan jelas.

CASCADING KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN DKPPP



Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian pangan, produktivitas pertanian/perikanan, dan kesejahteraan petani Kota Bekasi. Sasaran

tersebut meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, serta bergizi bagi masyarakat disamping itu juga Mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, serta memastikan pangan yang beredar aman dikonsumsi.

Selanjutnya, untuk mendukung ketercapaian target terhadap sasaran tersebut, maka sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi difokuskan pada pencapaian indikator Indeks Ketahanan Pangan. Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menetapkan 1 (satu) tujuan yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis DKPPP dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya didukung oleh kinerja 5 (lima) bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Distribudi Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bidang Perikanan, Bidang Pertanian serta Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun target tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota		Indeks Ketahanan Pangan	94,00	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50	
		Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	92,00 %	92,25 %	92,50 %	92,75 %	93,00 %	93,25 %	
		Meningkatnya Produktifitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	
		Meningkatnya Produktifitas Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	1,00%	

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah (1) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan (2) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja (PERKIN) murni dan perubahan DKPPP tahun 2025 terdapat perbedaan pada sasaran strategis karena PERKIN Murni tahun 2025 masih berdasarkan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sedangkan PERKIN Perubahan Tahun 2025 sudah berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sehingga realisasi dan capaian kinerja tidak dapat dibandingkan. Perjanjian Kinerja (PERKIN) DKPPP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
 PERKIN Murni DKPPP Tahun 2025 dan PERKIN Perubahan DKPPP Kota Bekasi Tahun 2025

PERKIN MURNI DKPPP TAHUN 2025						PERKIN PERUBAHAN DKPPP TAHUN 2025				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	Triwulan I	-	Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	Triwulan I	-
				Triwulan II	-				Triwulan II	-
				Triwulan III	-				Triwulan III	-
				Triwulan IV	85				Triwulan IV	92
2	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	Triwulan I	-	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	Triwulan I	-
				Triwulan II	-				Triwulan II	-
				Triwulan III	-				Triwulan III	-
				Triwulan IV	0.45%				Triwulan IV	0.03%
3	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Triwulan I	-	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Triwulan I	-
				Triwulan II	-				Triwulan II	-
				Triwulan III	-				Triwulan III	-
				Triwulan IV	1.15%				Triwulan IV	0.04%

Tabel 2.4
Program dan Pendanaan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025
sesuai PERKIN murni dan PERKIN Perubahan DKPPP tahun 2025

PERKIN MURNI DKPPP TAHUN 2025			PERKIN PERUBAHAN DKPPP TAHUN 2025		
PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.096.937.000,00	Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.426.486.310,00	Sekretariat
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	300.000.000,00	Bidang KDP dan Bidang KKP	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	278.845.000,00	Bidang KDP dan Bidang KKP
Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.750.000.000,00	Bidang KDP	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.427.380.000,00	Bidang KDP
Program Pengawasan Keamanan Pangan	350.000.000,00	Bidang KKP	Program Pengawasan Keamanan Pangan	328.800.000,00	Bidang KKP
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	740.000.000,00	Bidang Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	732.222.100,00	Bidang Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	414.760.000,00	Bidang Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	393.707.500,00	Bidang Perikanan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.305.777.400,00	Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.201.884.400,00	Bidang Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	934.070.000,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	862.025.000,00	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Penyuluhan Pertanian	22.800.000,00	Bidang Pertanian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja sesuai misi dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran DKPPP Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja sasaran strategis DKPPP Kota Bekasi dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* realisasi kinerja aktual tahun 2025 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja *outcome*. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian IKU yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian program.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU.

Capaian kinerja yang telah dicapai DKPPP Kota Bekasi selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja DKPPP Kota Bekasi tahun 2025, serta 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari tiga indikator kinerja tersebut hanya 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target yang ditentukan. Capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92	93.65	101.79%
2.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,03%	0,03%	100%
3.	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,04%	0,03%	75%

Sumber data : Renstra DKPPP 2025-2029 dan Laporan Tahunan DKPPP Kota BekasiTahun 2025, diolah

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DKPPP Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, diukur melalui indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan sebesar 92 dengan capaian kinerja 101.79%, maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada indikator kinerja mencapai target.

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Produktivitas Perikanan telah menetapkan indikator yaitu Persentase Peningkatan Produksi Perikanan sebesar 0,03% dengan capaian kinerja 100%, dapat diinterpretasikan sasaran DKPPP Kota Bekasi tahun 2025 pada indikator ini tercapai.

Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Produktivitas Pertanian dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dengan capaian kinerja 75%, dapat diinterpretasikan bahwa sasaran kinerja DKPPP Kota Bekasi tahun 2025 pada indikator ini belum mencapai target.

Dengan melihat 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana ketiga indikator kinerja di atas mendukung ketercapaian indikator tujuan DKPPP Kota Bekasi tahun 2025 dalam Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang mencapai target yaitu dengan realisasi skor pola pangan harapan sebesar nilai 93.65 dari target nilai yang telah ditetapkan sebesar 92 dengan capaian kinerja 101.79%, Sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Perikanan dengan realisasi Persentase Peningkatan Produksi Perikanan sebesar 0,03% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,03% dengan capaian kinerja 100%, serta sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Pertanian yaitu dengan realisasi Persentase Peningkatan Produksi Pertanian sebesar 0,03% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,04% dengan capaian kinerja 75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator sasaran DKPPP Kota Bekasi sudah sepenuhnya mendukung tujuan DKPPP Kota Bekasi dan capaian Sasaran Startegis pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja : Skor Pola Pangan Harapan

Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama /Indikator Sasaran untuk mengukur Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mencapai Tujuan RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota.

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama Skor Pola Pangan Harapan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pola Pangan Harapan. Undang-undang ini menetapkan peraturan badan pangan nasional tentang pola pangan harapan yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan Pangan seperti Angka Kecukupan Gizi (AKG) yaitu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat serta jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizi. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat, data bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Penghitungannya berbasis konsumsi dan pengeluaran pangan rumah tangga yang mencakup sembilan (9) kelompok pangan utama, yakni padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta bahan minuman dan bumbu-bumbuan. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan peningkatan keberagaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Bekasi semakin baik. Cara pengukuran capaian indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan adalah:

PPH = Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

Hasil Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan gambaran kondisi konsumsi pangan penduduk secara kualitas yang juga menunjukkan keberagaman konsumsi pangan. Hasil Justifikasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Tahun 2025 menggunakan data susenas tahun 2025 dengan perhitungan memakai perhitungan AKE =

2100 kkal/kapita/hari dan AKP = 57 Gram/kapita/hari dengan menggunakan Aplikasi Harmonisasi Skor Pola Pangan Harapan dengan hasil pada Tabel berikut :

Tabel 3.2
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Penduduk Kota Bekasi
Tahun 2025

		Berat (gram/kap/hari)	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)	SKOR MAKS	SKOR PPH
		Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
KELOMPOK PANGAN	Padi-padian	250.49	991.18	22.57	25.00	23.60
	Umbi-umbian	51.55	52.91	1.01	2.50	1.26
	Pangan Hewani	162.26	333.78	29.03	24.00	24.00
	Minyak dan Lemak	29.76	266.93	.04	5.00	5.00
	Buah/Biji Berminyak	.96	5.60	.12	1.00	.13
	Kacang-kacangan	36.58	86.03	7.04	10.00	8.19
	Gula	18.36	61.41	.48	2.50	1.46
	Sayur dan Buah	273.92	144.22	4.75	30.00	30.00
	Lain-lain	94.04	52.77	1.43	0.00	0.00
		93.65				

Sumber : Data Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2025

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah tercapai. Adapun capaian kinerja indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	2	3	6	7	8
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92	93,65	101,79%

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2025 sebesar 92 sementara realisasi mencapai 93,65 maka capaian kinerja tahun 2025 atas Skor Pola Pangan Harapan sebesar 101,79% artinya indikator kinerja sudah mencapai target.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

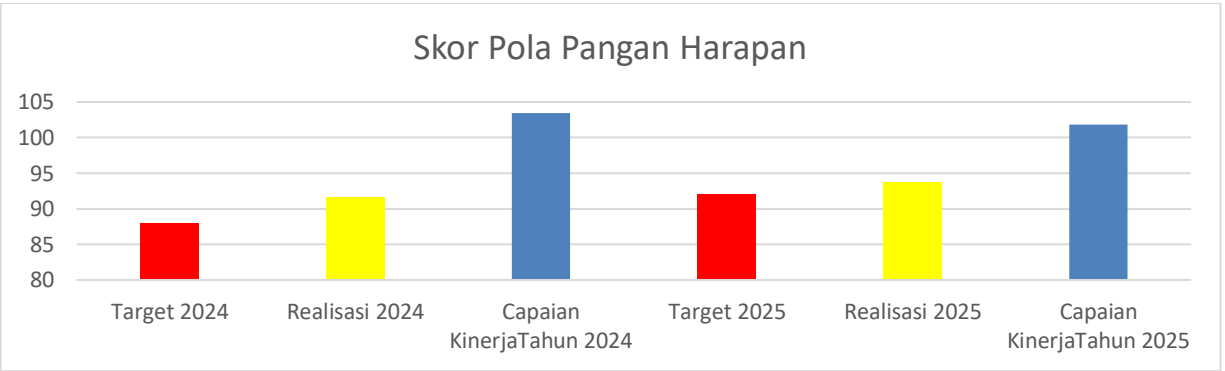
Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian KinerjaTahun 2024	Tahun 2025		Capaian KinerjaTahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Skor Pola Pangan Harapan	skor	88.50	91.53	103.42	92	93,65	101,79

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Gambar 3.1.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi target kinerja tahun 2025 sebesar 93,65, lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 91,53. Ke depan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan akan memaksimalkan peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Bekasi.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029)

Capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Skor Pola Pangan Harapan Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Skor Pola Pangan Harapan	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Renstra DKPPP Tahun 2025-2029)
Target	Skor	92	93,25
Realisasi	Skor	93,65	93,65

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, capaian Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2025 sebesar 93,65 dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029) sebesar 93,25, maka kinerja DKPPP sudah melebihi target akhir renstra yang ditetapkan. Walaupun sudah mencapai target DKPPP Kota Bekasi akan terus meningkatkan kinerja serta mengevaluasi penetapan kinerja di tahun 2026. DKPPP Kota Bekasi tetap harus menyusun langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan realisasi capaian kinerja indikator Skor Pola Pangan Harapan ini, yang akan diuraikan pada bagian E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi di bawah.

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain

Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat adalah 95 (Sembilan puluh lima) secara nasional berada pada peringkat 12 dari 38 Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan di Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik, mendekati angka ideal 100. Nilai ini menandakan Masyarakat Provinsi Jawa Barat telah menerapkan pola makan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Kota Bekasi juga memperoleh Skor Pola Pangan Harapan sebesar 93.65 (Sembilan puluh tiga koma enam puluh lima) ini juga menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan di Kota Bekasi sudah **sangat baik, beragam, dan bergizi seimbang**.

Perbandingan dengan standar Nasional/ Provinsi (*benchmark*) untuk indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Skor PPH Menurut Provinsi Tahun 2025

	Klasifikasi Tempat Tinggal			
	Perkotaan+Perdesaan			
	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	Skor PPH	
	Mean	Mean	Mean	
PROVINSI	ACEH	2028	61.56	89.7
	SUMATERA UTARA	2070	63.33	93.4
	SUMATERA BARAT	2079	60.17	93.4
	RIAU	2034	60.13	92.7
	JAMBI	2040	60.29	93.5
	SUMATERA SELATAN	2202	66.89	95.1
	BENGKULU	2060	61.87	93.1
	LAMPUNG	2038	59.04	93.1
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2033	66.99	92.3
	KEPULAUAN RIAU	2118	69.82	92.5
	DKI JAKARTA	2086	68.24	94.7
	JAWA BARAT	2085	63.50	95.0
	JAWA TENGAH	2028	60.26	96.9
	DI YOGYAKARTA	2066	65.00	96.9
	JAWA TIMUR	2092	62.05	95.8
	BANTEN	2148	65.34	96.0
	BALI	2224	66.54	94.3
	NUSA TENGGARA BARAT	2448	74.66	95.3
	NUSA TENGGARA TIMUR	1974	56.70	79.3
	KALIMANTAN BARAT	1894	59.12	88.8
	KALIMANTAN TENGAH	2113	64.99	92.7
	KALIMANTAN SELATAN	2172	69.54	93.1
	KALIMANTAN TIMUR	1934	63.84	90.4
	KALIMANTAN UTARA	1871	62.50	86.2
	SULAWESI UTARA	2051	65.89	91.6
	SULAWESI TENGAH	2016	59.90	87.5
	SULAWESI SELATAN	2092	64.77	92.3
	SULAWESI TENGGARA	1991	62.17	87.8
	GORONTALO	1987	60.58	83.2
	SULAWESI BARAT	2065	61.53	85.1
	MALUKU	1852	56.32	83.0
	MALUKU UTARA	1826	54.11	82.4
	PAPUA BARAT	1813	51.78	81.7
	PAPUA BARAT DAYA	1800	56.25	83.4
	PAPUA	1745	52.45	79.6
	PAPUA SELATAN	1875	55.60	84.9
	PAPUA TENGAH	1760	46.59	78.2
	PAPUA PEGUNUNGAN	2115	41.34	68.1
	INDONESIA	2073	62.78	95.1

Sumber : Data Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) tahun 2025

Tabel 3.7
Skor PPH, Konsumsi Kalori Dan Protein, Menurut Kabupaten/Kota, 2025

		Skor PPH	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)
		Mean	Mean	Mean
KABUPATEN / KOTA	3201 KAB. BOGOR	93.59	2011	60.68
	3202 KAB. SUKABUMI	93.56	2204	65.31
	3203 KAB. CIANJUR	91.63	2107	60.89
	3204 KAB. BANDUNG	95.78	2049	60.94
	3205 KAB. GARUT	92.55	2066	57.76
	3206 KAB. TASIKMALAYA	90.89	2071	59.61
	3207 KAB. CIAMIS	97.01	2265	69.29
	3208 KAB. KUNINGAN	94.45	2057	59.81
	3209 KAB. CIREBON	96.67	2194	69.65
	3210 KAB. MAJALENGKA	94.65	2105	61.03
	3211 KAB. SUMEDANG	96.91	2217	65.13
	3212 KAB. INDRAMAYU	97.52	2414	77.44
	3213 KAB. SUBANG	90.48	1949	59.44
	3214 KAB. PURWAKARTA	93.70	2101	61.78
	3215 KAB. KARAWANG	94.38	2080	65.45
	3216 KAB. BEKASI	94.75	2147	66.90
	3217 KAB. BANDUNG BARAT	91.76	2008	57.86
	3218 KAB. PANGANDARAN	95.40	2293	70.21
	3271 KOTA BOGOR	93.82	2102	66.81
	3272 KOTA SUKABUMI	94.12	2077	64.13
	3273 KOTA BANDUNG	91.01	1896	58.53
	3274 KOTA CIREBON	96.12	2040	63.34
	3275 KOTA BEKASI	93.65	1995	66.45
	3276 KOTA DEPOK	92.95	1988	63.89
	3277 KOTA CIMAHI	92.30	1955	61.94
	3278 KOTA TASIKMALAYA	96.04	2323	70.26
	3279 KOTA BANJAR	98.12	2487	73.95

Sumber : Data Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) tahun 2025

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator “Skor Pola Pangan Harapan” tahun 2025 ini adalah :

- 1. Didorong dengan beralihnya pola konsumsi masyarakat yang tadinya tinggi di beras beralih ke pangan lokal seperti ubi dan sayuran melalui kegiatan sosialisasi pangan lokal asal tumbuhan;
- 2. Peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu menyediakan pangan yang lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman;

3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
4. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pangan beragam bergizi seimbang dan aman;
5. Perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi lebih beragam dan tidak tergantung pada satu jenis pangan saja.
6. Ketersediaan Sarana Prasarana Pengujian, Kemampuan Sumber Daya Manusia, serta peran aktif dan kesadaran pelaku usaha untuk memastikan pangan aman, bermutu, bergizi, serta Sosialisasi ke Masyarakat

Walaupun realisasi indikator kinerja “Skor Pola Pangan Harapan” tahun 2025 telah memenuhi target, ditemui kendala yang dihadapi seperti kurangnya SDM dan anggaran yang terbatas.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai kinerja indikator Skor Pola Pangan Harapan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan tiga (3) program yaitu program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, serta program pengawasan keamanan pangan dengan 3 (tiga) indikator program. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut.

Tabel 3.8

Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan

No	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	92.75%	93.65%	100.97%
2.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	86.50%	89.29%	103.23%
3.	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	89.00%	98.57%	110.76%

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, target indikator Program yang diampu oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 seluruhnya tercapai dengan realisai melebihi target.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Skor Pola Pangan harapan

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
				(Rp)	%		
1	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	278.845.000,00	232.164.100,00	83,26	100,00	16.74
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00	0.00
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00	0.00
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	178.845.000	132.164.100	73,90	100,00	26.10
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	178.845.000	132.164.100	73,90	100,00	26.10
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.427.380.000	2.189.909.38	90,22	100,00	9.78
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21.400.000	20.442.000	95,52	100,00	4.48
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta	21.400.000	20.442.000	95,52	100,00	4.48

		Ketahanan dan Kerentanan Pangan					
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.405.980.000	2.169.467.380	90,17	100,00	9.83
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.405.980.000	2.169.467.380	90,17	100,00	9.83
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	328.800.000	305.744.856	92,99	100,00	7.01
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	328.800.000	305.744.856	2,99	100,00	7.01
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	328.800.000	305.744.856	92,99	100,00	7.01

Sumber:<https://simpelbang.bekasikota.go.id/>, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.278.845.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 232.164.100,- Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 83.26 persen. Dengan anggaran yang sebesar 83.26 persen dapat mencapai output 100 persen, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 16.74 persen.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.427.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.189.909.380,- Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang

dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 90.22 persen. Dengan anggaran yang sebesar 90.22 persen dapat mencapai output 100 persen, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 9.78 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.328.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.5.744.856,- Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 92.99 persen. Dengan anggaran yang sebesar 92.99 persen dapat mencapai output 100 persen, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 7.01 persen.

Disamping anggaran yang efisien, pelaksanaan program yang mendukung indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan fungsional (berjumlah 2 orang) dan staf pelaksanaan (berjumlah 11 orang).

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produktivitas Perikanan

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian peningkatan produksi Perikanan, yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan ketahanan pangan yang kuat di Kota Bekasi.

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Produksi Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. UU ini menetapkan kerangka hukum untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan, termasuk aspek produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah tercapai. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut.

Tabel 3.10
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

No	Indikator Program	Baseline (2024)	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.974,79 Ton	1.975,10 ton	1.975,40 ton	100%

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Cara pengukuran capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1} \times 100\%$$
$$\frac{1.975,40 \text{ Ton} - 1.974,79 \text{ Ton}}{1.974,79 \text{ Ton}} \times 100\% = 0.03\%$$

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan sudah tercapai. Adapun

capaian kinerja indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,03%	0.03%	100%

Sumber data: Bidang Perikanan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan yang signifikan terhadap Produksi Perikanan Kota Bekasi pada Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	persen	0%	0%	0%	0,03%	0,03%	100%

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Gambar 3.2.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi target kinerja tahun 2025 sebesar 0.03%, lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0.0%. Ke depan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan akan memaksimalkan peningkatan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan di Kota Bekasi.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029)

Capaian indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Renstra DKPPP Tahun 2025-2029)
Target	persen	0.03%	0.08%
Realisasi	persen	0.03%	0.03%

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, capaian persentase peningkatan produksi perikanan pada tahun 2025 sebesar 0.03% dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029) sebesar 0.08, maka kinerja DKPPP belum mencapai target akhir renstra.

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain

Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan untuk mengukur efektivitas pembangunan daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Perbandingan ini mengevaluasi seberapa besar kontribusi tingkat daerah dalam mendukung sasaran strategis yang lebih luas. Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Provinsi Jawa Barat dapat dihitung dengan menjumlahkan produksi perikanan provinsi Jawa Barat tahun 2024 dan tahun 2025.

Adapun produksi perikanan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Jenis Perikanan	Jumlah Produksi	
		2024	2025
1.	Perikanan Tangkap dan Perairan umum	285.936 ton	286.634,26 ton
2.	Perikanan Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut	1.317.719 ton	1.269.317,45 ton
Total Produksi Perikanan		1.603.655,16 ton	1.555.951,71 ton

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kabupaten Indramayu menjadi penyumbang terbesar perikanan Jawa Barat dengan total produksi mencapai 523.265,16 ton pada tahun 2024 (berkontribusi sekitar 32,70% dari total produksi provinsi) dan pada tahun 2025 kontribusi sebesar 528.873,80 ton atau sekitar 32,9% dari total produksi keseluruhan di Jawa Barat.

Untuk Mengukur Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1} \times 100\%$$
$$\frac{1.555.951,71 \text{ Ton} - 1.603.655,16 \text{ Ton}}{1.603.655,16 \text{ Ton}} \times 100\% = -0.03\%$$

Persentase peningkatan produksi perikanan provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 sebesar -0.03%, artinya tidak ada peningkatan produksi perikanan provinsi Jawa Barat selama Tahun 2025.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator “Persentase Peningkatan Produksi Perikanan” tahun 2025 ini adalah :

1. Adanya bantuan sarana prasarana budidaya Perikanan berupa : benih ikan lele, pakan ikan, pompa air, serokan ikan, bak fiber, bak sortir serta Baskom plastik kepada kelompok pembudidaya ikan di Kecamatan jatisampurna,

- Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Rawalumbu serta Kecamatan Medan satria;
2. Tinggi permintaan pasar akan ikan konsumsi seperti ikan lele, ikan gabus, ikan mas, ikan nila serta ikan gurame;
 3. Dilakukannya sertifikasi kelayakan pengolahan ikan;
 4. Adanya bantuan sarana prasarana olahan hasil perikanan berupa Freezer kepada 3 (tiga) Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar) yaitu Poklahsar Mina Uwais Kelurahan Margahayu, Poklahsar Tiara Mina Kelurahan Margahayu, serta Poklahsar Mitra Sejahtera Kelurahan Durenjaya.

Walaupun realisasi indikator kinerja “Persentase Peningkatan Produksi Perikanan” tahun 2025 sudah mencapai target, ditemui kendala yang dihadapi seperti adanya banjir yang sangat merugikan pembudidaya ikan, menyebabkan kerusakan fisik (sarana prasaran budi daya ikan) , hilangnya ikan karena hanyut/ lepas hingga penurunan produksi dan Lokasi Pembudidaya Perikanan terdampak penggusuran di wilayah Kelurahan Teluk Pucung karena berada di tanah pengairan.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai kinerja indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan dua (2) program yaitu program pengelolaan perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan 2 (dua) indikator program. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut.

Tabel 3.14
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

No	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.975,10 ton	1.975,40 ton	100%
2.	Jumlah Produksi Olahan Perikanan	95.000 ton	95.950 ton	101%

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, target indikator Program yang diampu oleh Kepala Bidang Perikanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah produksi perikanan budidaya sudah mencapai target dan jumlah produksi olahan perikanan sudah tercapai dengan realisasi melebihi target.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
				(Rp)	%		
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	732.222.100	551.303.970	75,29	100,00	24.71
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	272.129.000	168.951.100	62,08	100,00	37.92
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Keci	272.129.000	168.951.100	62,08	100,00	37.92
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	460.093.100	382.352.870	83,10	100,00	16.90
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	460.093.100	382.352.870	83,10	100,00	16.90
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	393.707.500	383.366.700	97,37	100,00	2.63
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	43.820.000	40.841.700	93,20	100,00	6.80
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha	43.820.000	40.841.700	93,20	100,00	6.80

		PadaUsaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	349.887.500	342.525.000	97,90	100,00	2.10
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	349.887.500	342.525.000	97,90	100,00	2.10

Sumber:<https://simpelbang.bekasikota.go.id/>, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan didukung oleh 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.732.222.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 551.303.970,- Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 75.29 persen. Dengan anggaran yang sebesar 75.29 persen dapat mencapai output 100 persen, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 24.71 persen.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 393.707.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 383.366.700,- Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 97.37 persen. Dengan anggaran yang sebesar 97.37 persen dapat mencapai output 100 persen, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 2.63 persen.

Di samping anggaran yang efisien, pelaksanaan Program yang mendukung indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan fungsional (berjumlah 2 orang) dan staf Pelaksana (berjumlah 5 orang).

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Produktivitas Pertanian
Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Produksi Pertanian

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Produksi Pertanian merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian peningkatan produksi pertanian, yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan ketahanan pangan yang kuat di Kota Bekasi.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DKPPP Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan belum tercapai. Adapun capaian kinerja untuk indikator sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian

No	Indikator Program	Baseline 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	2.379 ton	2.380 ton	2.153 ton	90.46%
2.	Jumlah produksi Hortikultura	22.170 ton	22.180 ton	20.994,50 ton	94.65%
3	Jumlah produksi komoditas peternakan	10.765 ton	11.093 ton	13.226,56 ton	119,23%

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Cara pengukuran capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - \text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Produksi Tahun } n - 1} \times 100\%$$
$$\frac{36.374,06 \text{ Ton} - 35.314 \text{ Ton}}{35.314 \text{ Ton}} \times 100\% = 0.03\%$$

Tabel 3.17

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,04%	0,03%	75%

Sumber data: Bidang Pertanian Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	persen	0%	0%	0%	0,04%	0,03%	75%

Gambar 3.3.

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi target kinerja tahun 2025 sebesar 0.03%, lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0.0%. Ke depan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan akan memaksimalkan peningkatan Persentase Peningkatan Produksi Pertanian di Kota Bekasi.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029)

Capaian indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Renstra DKPPP Tahun 2025-2029)
Target	persen	0.04%	1.00%
Realisasi	persen	0.03%	0.03%

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, capaian Persentase Peningkatan Produksi Pertanian pada tahun 2025 sebesar 0.03% dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DKPPP Tahun 2025-2029) sebesar 1.00%, maka kinerja DKPPP belum mencapai target akhir renstra.

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025 tidak dapat disandingkan dengan Target Nasional/Provinsi/Daerah Lain karena perbedaan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Pertanian.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja indikator “Persentase Peningkatan Produksi Pertanian” tahun 2025 ini adalah

- 1. Lahan pertanian banyak yang beralih fungsi dari lahan pertanian ke lahan perumahan (di Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Bantargebang);
- 2. Adanya komitmen LSD (Lahan Sawah Dilindungi) antara pemilik lahan dan petani, mengakibatkan apabila komitmen berakhir maka lahan tadinya sawah menjadi dilarang buat sawah;
- 3. Kurangnya SDM Penyuluh Pertanian;
- 4. Banyaknya kelompok tani yang sudah tidak aktif;
- 5. Dipengaruhi oleh kombinasi faktor iklim/cuaca seperti banyak lahan yang tergenang banjir Ketika musim hujan;

Alternatif Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan produksi Pertanian

- 1. Pemberian bantuan sarana prasarana pertanian berupa Bibit/Benih, pupuk, teknologi pertanian, Alat Mesin Pertanian (Alsintan);
- 2. Peningkatan Penyuluhan Pertanian;
- 3. Peningkatan Kapasitas Petani Milenial.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai kinerja indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan tiga (3) program yaitu program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta program penyuluhan pertanian dengan 6 (enam) indikator program. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut.

Tabel 3.20
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian

No	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	2.380 ton	2.153 ton	90.46%
2.	Jumlah produksi Hortikultura	22.180 ton	20.994,50 ton	94.65%
3.	Jumlah produksi komoditas peternakan	11.093 ton	13.226,56 ton	119,23%

4.	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	70.50%	75.00%	106.38%
5.	Presentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	46.00%	56.08%	121.91%
6.	Persentase Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Yang ditingkatkan	100%	100%	100%

Sumber : Data Diolah DKPPP Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, target indikator Program yang diampu oleh Kepala Bidang Pertanian dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah produksi tanaman pangan dan jumlah produksi hortikultura yang belum mencapai target.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
 Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase
 Peningkatan Produksi Pertanian

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
				(Rp)	%		
1	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.201.884.400	1.926.798.990	60,18	100,00	39.82
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.442.700.400	288.993.554	20,03	100,00	79.97
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	305.777.400	288.993.554	94,51	100,00	5.49
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.136.923.000	0,00	0,00	100,00	100

		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	955.184.000	884.194.550	92,57	100,00	7.43
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	955.184.000	884.194.550	92,57	100,00	7.43
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	94.000.000	92.051.016	97,93	100,00	2.07
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	94.000.000	92.051.016	97,93	100,00	2.07
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	85.000.000	67.756.420	79,71	100,00	20.29
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	85.000.000	67.756.420	79,71	100,00	20.29
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	625.000.000	593.803.450	95,01	100,00	4.99
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	625.000.000	593.803.450	95,01	100,00	4.99
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	862.025.000	777.871.380	90,24	100,00	9.76
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	327.140.000	309.716.935	94,67	100,00	5.33
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327.140.000	309.716.935	94,67	100,00	5.33

		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	397.035.000	339.639.165	85,54	100,00	14.46
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	168.920.000	132.882.669	78,67	100,00	21.33
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	228.115.000	206.756.496	90,64	100,00	9.36
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	137.850.000	128.515.280	93,23	100,00	6.77
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	137.850.000	128.515.280	93,23	100,00	6.77
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	22.800.000	22.040.000	96,67	100,00	3.33
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	22.800.000	22.040.000	96,67	100,00	3.33
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	22.800.000	22.040.000	96,67	100,00	3.33

Sumber:<https://simplerbang.bekasikota.go.id/>, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.201.884.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.926.798.990,- Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 60.18 persen. Dengan anggaran yang sebesar 60.18 persen dapat mencapai output 100 persen, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 39.82 persen.
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 862.025.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 777.871.380,- Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 90.24 persen. Dengan anggaran yang sebesar 90.24 persen dapat

mencapai output 100 persen, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 9.76 persen.

3. Program Penyuluhan Pertanian yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.040.000,- Berdasarkan hasil evaluasi SIMPELBANG serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 96.67 persen. Dengan anggaran yang sebesar 96.67 persen dapat mencapai output 100 persen, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 3.33 persen.

Di samping anggaran yang efisien, pelaksanaan Program yang mendukung indikator sasaran Persentase Peningkatan Produksi Pertanian menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan fungsional (berjumlah 17 orang) dan staf Pelaksana (berjumlah 11 orang).

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 didukung dengan anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp. 24.674.150.310 (dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp. 20.866.647.450 (dua puluh milyar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan capaian sebesar (84.57%).

Berikut realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama DKPPP yang terdiri dari 9 (sembilan) Program dengan 25(dua puluh lima) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan.

Tabel 3.22

Realisasi Belanja Langsung Urusan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.03.02	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	24,674,150,310	24,674,150,310	100	20,866,647,450	84.57	100	96.6	-15.43	-3.4
2.03.02.01	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	24,674,150,310	24,674,150,310	100	20,866,647,450	84.57	100	96.6	-15.43	-3.4
2.03.02.01 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,426,486,310	16,426,486,310	100	14,477,448,074	88.13	100	99.71	-11.87	-0.29
2.03.02.01 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,426,486,310	16,426,486,310	100	14,477,448,074	88.13	100	99.71	-11.87	-0.29
2.03.02.01 - 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,390,000	22,390,000	100	21,939,000	97.99	100	100	-2.01	0
2.03.02.01 - 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,920,000	15,920,000	100	15,685,000	98.52	100	100	-1.48	0
2.03.02.01 - 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,470,000	6,470,000	100	6,254,000	96.66	100	100	-3.34	0

2.03.02.01 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,600,530,000	12,600,530,000	100	11,163,709,097	88.6	100	100	-11.4	0
2.03.02.01 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,595,530,000	12,595,530,000	100	11,158,770,597	88.59	100	100	-11.41	0
2.03.02.01 - 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000	5,000,000	100	4,938,500	98.77	100	100	-1.23	0
2.03.02.01 - 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195,900,000	195,900,000	100	78,811,886	40.23	100	75.5	-59.77	-24.5
2.03.02.01 - 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80,000,000	80,000,000	100	7,690,886	9.61	100	40	-90.39	-60
2.03.02.01 - 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115,900,000	115,900,000	100	71,121,000	61.36	100	100	-38.64	0
2.03.02.01 - 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	558,303,750	558,303,750	100	497,155,564	89.05	100	100	-10.95	0
2.03.02.01 - 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65,000,000	65,000,000	100	60,523,999	93.11	100	100	-6.89	0
2.03.02.01 - 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343,532,750	343,532,750	100	324,736,840	94.53	100	100	-5.47	0
2.03.02.01 - 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,530,000	21,530,000	100	21,423,000	99.5	100	100	-0.5	0
2.03.02.01 - 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	15,000,000	100	13,800,000	92	100	100	-8	0

2.03.02.01 - 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77,441,000	77,441,000	100	41,803,000	53.98	100	100	-46.02	0
2.03.02.01 - 01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35,800,000	35,800,000	100	34,868,725	97.4	100	100	-2.6	0
2.03.02.01 - 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77,241,000	77,241,000	100	69,040,000	89.38	100	100	-10.62	0
2.03.02.01 - 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	57,000,000	57,000,000	100	53,500,000	93.86	100	100	-6.14	0
2.03.02.01 - 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,241,000	20,241,000	100	15,540,000	76.77	100	100	-23.23	0
2.03.02.01 - 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,794,806,060	1,794,806,060	100	1,597,591,648	89.01	100	100	-10.99	0
2.03.02.01 - 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000	200,000,000	100	102,005,237	51	100	100	-49	0
2.03.02.01 - 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,594,806,060	1,594,806,060	100	1,495,586,411	93.78	100	100	-6.22	0
2.03.02.01 - 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,177,315,500	1,177,315,500	100	1,049,200,879	89.12	100	100	-10.88	0
2.03.02.01 - 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230,000,000	230,000,000	100	215,970,538	93.9	100	100	-6.1	0

2.03.02.01 - 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328,915,500	328,915,500	100	224,387,277	68.22	100	100	-31.78	0
2.03.02.01 - 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,000,000	56,000,000	100	53,708,500	95.91	100	100	-4.09	0
2.03.02.01 - 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	562,400,000	562,400,000	100	555,134,564	98.71	100	100	-1.29	0
2.03.02.01 - 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	278,845,000	278,845,000	100	232,164,100	83.26	100	93.59	-16.74	-6.41
2.03.02.01 - 03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100,000,000	100,000,000	100	100,000,000	100	100	100	0	0
2.03.02.01 - 03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100,000,000	100,000,000	100	100,000,000	100	100	100	0	0
2.03.02.01 - 03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	178,845,000	178,845,000	100	132,164,100	73.9	100	90	-26.1	-10
2.03.02.01 - 03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis	178,845,000	178,845,000	100	132,164,100	73.9	100	90	-26.1	-10

	Sumber Daya Lokal									
2.03.02.01 - 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2,427,380,000	2,427,380,000	100	2,189,909,380	90.22	100	100	-9.78	0
2.03.02.01 - 04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21,400,000	21,400,000	100	20,442,000	95.52	100	100	-4.48	0
2.03.02.01 - 04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21,400,000	21,400,000	100	20,442,000	95.52	100	100	-4.48	0
2.03.02.01 - 04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2,405,980,000	2,405,980,000	100	2,169,467,380	90.17	100	100	-9.83	0
2.03.02.01 - 04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,405,980,000	2,405,980,000	100	2,169,467,380	90.17	100	100	-9.83	0
2.03.02.01 - 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	328,800,000	328,800,000	100	305,744,856	92.99	100	100	-7.01	0
2.03.02.01 - 05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	328,800,000	328,800,000	100	305,744,856	92.99	100	100	-7.01	0
2.03.02.01 - 05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	328,800,000	328,800,000	100	305,744,856	92.99	100	100	-7.01	0

2.03.02.01 - 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	732,222,100	732,222,100	100	551,303,970	75.29	100	96.28	-24.71	-3.72
2.03.02.01 - 04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	272,129,000	272,129,000	100	168,951,100	62.08	100	90	-37.92	-10
2.03.02.01 - 04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	272,129,000	272,129,000	100	168,951,100	62.08	100	90	-37.92	-10
2.03.02.01 - 04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	460,093,100	460,093,100	100	382,352,870	83.1	100	100	-16.9	0
2.03.02.01 - 04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	460,093,100	460,093,100	100	382,352,870	83.1	100	100	-16.9	0
2.03.02.01 - 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	393,707,500	393,707,500	100	383,366,700	97.37	100	100	-2.63	0
2.03.02.01 - 06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	43,820,000	43,820,000	100	40,841,700	93.2	100	100	-6.8	0
2.03.02.01 - 06.2.02.02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	43,820,000	43,820,000	100	40,841,700	93.2	100	100	-6.8	0
2.03.02.01 - 06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	349,887,500	349,887,500	100	342,525,000	97.9	100	100	-2.1	0

2.03.02.01 - 06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	349,887,500	349,887,500	100	342,525,000	97.9	100	100	-2.1	0
2.03.02.01 - 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3,201,884,400	3,201,884,400	100	1,926,798,990	60.18	100	76.92	-39.82	- 23.08
2.03.02.01 - 02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1,442,700,400	1,442,700,400	100	288,993,554	20.03	100	48.78	-79.97	- 51.22
2.03.02.01 - 02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	305,777,400	305,777,400	100	288,993,554	94.51	100	100	-5.49	0
2.03.02.01 - 02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1,136,923,000	1,136,923,000	100	-	0	100	35	-100	-65
2.03.02.01 - 02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	955,184,000	955,184,000	100	884,194,550	92.57	100	100	-7.43	0
2.03.02.01 - 02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	955,184,000	955,184,000	100	884,194,550	92.57	100	100	-7.43	0
2.03.02.01 - 02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	94,000,000	94,000,000	100	92,051,016	97.93	100	100	-2.07	0
2.03.02.01 - 02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	94,000,000	94,000,000	100	92,051,016	97.93	100	100	-2.07	0

2.03.02.01 - 02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	85,000,000	85,000,000	100	67,756,420	79.71	100	100	-20.29	0
2.03.02.01 - 02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	85,000,000	85,000,000	100	67,756,420	79.71	100	100	-20.29	0
2.03.02.01 - 02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	625,000,000	625,000,000	100	593,803,450	95.01	100	100	-4.99	0
2.03.02.01 - 02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	625,000,000	625,000,000	100	593,803,450	95.01	100	100	-4.99	0
2.03.02.01 - 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	862,025,000	862,025,000	100	777,871,380	90.24	100	99.25	-9.76	-0.75
2.03.02.01 - 04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	327,140,000	327,140,000	100	309,716,935	94.67	100	100	-5.33	0
2.03.02.01 - 04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327,140,000	327,140,000	100	309,716,935	94.67	100	100	-5.33	0
2.03.02.01 - 04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	397,035,000	397,035,000	100	339,639,165	85.54	100	98.37	-14.46	-1.63

	Daerah Kabupaten/Kota									
2.03.02.01 - 04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	168,920,000	168,920,000	100	132,882,669	78.67	100	96.16	-21.33	-3.84
2.03.02.01 - 04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	228,115,000	228,115,000	100	206,756,496	90.64	100	100	-9.36	0
2.03.02.01 - 04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	137,850,000	137,850,000	100	128,515,280	93.23	100	100	-6.77	0
2.03.02.01 - 04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	137,850,000	137,850,000	100	128,515,280	93.23	100	100	-6.77	0
2.03.02.01 - 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	22,800,000	22,800,000	100	22,040,000	96.67	100	100	-3.33	0
2.03.02.01 - 07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	22,800,000	22,800,000	100	22,040,000	96.67	100	100	-3.33	0
2.03.02.01 - 07.2.01.06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	22,800,000	22,800,000	100	22,040,000	96.67	100	100	-3.33	0
TOTAL		24,674,150,310	24,674,150,310	100	20,866,647,450	84.57	100	96.6	-15.43	-3.4

Sumber:<https://simplerbang.bekasikota.go.id/>, 2025

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi DKPPP tahun 2025 tersebut sebagai berikut:

- a. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/timeline yang jelas dan rinci sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan.
- b. Adanya komitmen tim seluruh aparatur DKPPP dalam melaksanakan rangkaian aktivitas dari sub kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan/timeline yang telah ditentukan;
- c. pemanfaatan teknologi informasi atau digital dalam pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah dan penyebaran produk perencanaan sehingga memudahkan dan mempercepat pelaksanaan.

Di samping itu, dengan teknologi informasi atau digital maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya anggaran seperti mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat atau pertemuan tatap muka dan mengurangi anggaran cetak dokumen;

3.4. PRESTASI ORGANISASI

Prestasi atau penghargaan yang diperoleh oleh DKPPP Kota Bekasi tahun 2025 adalah :

1. Penghargaan dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman pangan atas kontribusi terhadap peningkatan produksi padi Provinsi Jawa barat sebesar 10,2 juta Ton GKG dan Nasional 60,37 juta Ton GKG (15 Desember 2025)
2. Peringkat Lima Belas Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.6.3/Kep.376-Org/Vii/2024 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengukuran Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

LKIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi atas penyelenggaraan program dan kegiatan Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Secara singkat dapat disampaikan bahwa :

1. Realisasi Skor Pola pangan Harapan sebesar 93.65 poin dengan capaian kinerja 101,79% menggambarkan bahwa kualitas konsumsi pangan di Kota Bekasi sudah sangat baik, beragam, dan bergizi seimbang.
2. Realisasi Persentase Peningkatan Produksi Perikanan sebesar 0.03% dengan capaian kinerja 100% menggambarkan bahwa adanya pertumbuhan yang signifikan terhadap Produksi Perikanan Kota Bekasi pada Tahun 2025.
3. Realisasi Persentase Peningkatan Produksi Pertanian sebesar 0.03% dengan capaian kinerja 75% menggambarkan bahwa pertumbuhan Produksi Pertanian Kota Bekasi pada Tahun 2025 masih dibawah target.

Ketercapaian kinerja diperoleh melalui pelaksanaan 9 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana

Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyuluhan Pertanian. Dari pelaksanaan program-program tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki efisiensi sebesar 15,43% atau sebesar Rp 3.807.502.860,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 24.674.150.310,00 terealisasi sebesar Rp 20.866.647.450,00. Dengan kinerja yang telah dicapai di tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan baik kinerja maupun akuntabilitas kinerja. dengan demikian dapat mewujudkan Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Bekasi yang lebih efektif dalam mensejahterakan masyarakat.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2025 adalah tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta membentuk kerjasama dan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam urusan Pangan, urusan Pertanian serta urusan Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten dengan mengikuti bimbingan teknis, workshop, sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan di bidangnya masing-masing;
3. Memperbaiki dan menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan;
4. Menjalin kerja sama dengan instansi lain (stakeholder) dalam pelaksanaan program-program DKPPP dan melakukan upaya-upaya progresif dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Bekasi, 13 Maret 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota

Bekasi.



KARTO, S.I.P., M.Si

NIP. 196704151986031005

LAMPIRAN :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herbert S. W. Panjaitan, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 03 Maret 2025
Pihak pertama,

Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP	Nilai Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	85
2.	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	0.45 %
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	1.15 %

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dil) APBD/DAU
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.096.937.760,-	APBD/DAU
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 300.000.000,-	APBD
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 1.750.000.000,-	APBD/DAU
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 350.000.000,-	APBD
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 740.000.000,-	APBD
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 414.760.000,-	APBD
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 2.305.777.400,-	APBD/DBHCHT
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 934.070.000,-	APBD
Total	Rp. 23.891.545.160,-	

Pihak Kedua,


Tri Achianto Tjahyono

Bekasi, 03 Maret 2025
Pihak Pertama,


Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19741017 199603 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karto, S.IP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono

Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bekasi, 20 Oktober 2025

Pihak pertama,

Tri Adhianto Tjahyono

Karto, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670415 198603 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Keberagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	92%
2.	Meningkatnya produktivitas perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	0,03 %
3.	Meningkatnya produktivitas Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi pertanian	0,04 %

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll) APBD/DAU
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.426.486.310,-	APBD/DAU
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 278.845.000,-	APBD
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 2.427.380.000,-	APBD/DAU
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 328.800.000-	APBD
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 732.222.100,-	APBD
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 393.707.500,-	APBD
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 3.201.884.400,-	APBD/DBHCHT
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 862.025.000,-	APBD
9. Program Penyuluh Pertanian	Rp. 22.800.000,-	DAK NON FISIK
Total	Rp. 22.674.150.310,-	

Pihak Kedua,

Bekasi, 20 Oktober 2025

Pihak Pertama,



Tri Adhianto Tjahyono



Karto, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19670415 198603 1 005



WALI KOTA BEKASI

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 000.8.6.3/Kep.376-Org/VII/2024

Wali Kota Bekasi dengan ini memberikan penghargaan kepada:

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Sebagai Peringkat XV (Kelimabelas)

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2024

dengan Nilai Hasil Evaluasi 79,48 dan mendapatkan Predikat Nilai:



DESEMBER 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2025

SELAMAT & SUKSES

KEPADA KOTA

BEKASI

ATAS KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI PADI
PROVINSI JAWA BARAT SEBESAR 10,2 JUTA TON GKG DAN NASIONAL
60,37 JUTA TON GKG

Jakarta, 15 Desember 2025

Direktur Serealia



Dr. Rachmat, S.Si., M.Si

NIP. 198011272005011001